

## PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG

**Suryaningsi**

Universitas Muhammadiyah Kupang

Email: [suryaningsi91@gmail.com](mailto:suryaningsi91@gmail.com)

### ABSTRAK

Daerah yang baik memerlukan adanya pedoman dalam proses penyusunannya. Kabupaten Kupang sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur selama ini telah menerapkan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi berbasis akrual, namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang masih diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dengan beberapa catatan pengecualian, termasuk dalam aspek kebijakan akuntansi dan sistem Pengendalian Intern. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi SDM secara parsial maupun silmutan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

Jenis penelitian adalah Deskriptif kuantitatif. populasi dalam penelitian ini adalah pejabat penata usaha keuangan *Organisasi Perangkat Daerah* yang berjumlah 36 orang dan 1 orang Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang. Metode sampel yang digunakan adalah metode sensus. Dengan demikian, total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 37 orang. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis regresi berganda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Kupang baik secara parsial maupun simultan. Dimana nilai signifikansi dari olahan data menunjukkan masih di bawah dari standar yang sudah ditentukan yakni dibawah 5%. Kontribusi variabel sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Kupang, sebesar 71,6 %.

*Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM*

### PENDAHULUAN

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Bagi pemerintah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah, yang mencakup tertib administrasi dan taat azas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah berkualitas yaitu dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan ini harus memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kabupaten Kupang sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur selama ini telah menerapkan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi berbasis akrual, namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan

BPK Tahun 2018, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017 masih diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dengan beberapa catatan pengecualian, termasuk dalam aspek kebijakan akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah (sumber: LHP BPK Tahun 2018). Demikian juga untuk Tahun Anggaran 2019, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang masih diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menetapkan bahwa Tahun Anggaran 2017-2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

Faktor pertama adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Sumber: LHP BPK Tahun Anggaran 2017, dan 2018), salah satu aspek yang mempengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang adalah kelemahan pengendalian intern yang signifikan atas proses penatausahaan dan penyajian aset tetap yaitu inventarisasi belum dilakukan menyeluruh, seperti yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017. Menurut opini Badan Pemeriksa Keuangan, permasalahan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang antara lain (sumber: LHP BPK TA. 2017, 2018 dan 2019):

1. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan;
2. Pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kupang belum tertib; dan
3. Belum terdapat keputusan final untuk likuidasi atau merger Perusahaan Daerah Kelautan, Perusahaan Daerah Agrobisnis dan Perusahaan Daerah Kantong Semen yang sudah tidak beroperasi dan laporan keuangannya belum disusun.

Tentunya permasalahan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini memiliki dampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kupang, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Jika pengendalian intern yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang secara konsisten dan teliti, maka setiap tahapan penyusunan laporan keuangan akan menyajikan data yang akurat. Dengan demikian, data-data laporan keuangan adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti administrasi yang lengkap.

Selain pengendalian dari pihak pemeriksa, dibutuhkan juga pengendalian dan pengawasan dari kuasa pengguna anggaran tiap Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 (lima) orang bendahara pada tanggal 11 November 2020, diperoleh informasi bahwa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah tidak memiliki jadwal yang pasti untuk melakukan pemeriksaan. Pimpinan hanya melakukan pemeriksaan jumlah penggunaan anggaran dan biaya apa yang belum direalisasikan. Sedangkan pemeriksaan administrasi keuangan tidak dilakukan dengan intens sehingga menciptakan peluang untuk terjadi kesalahan dalam administrasi pelaporan.

Faktor berikut yang berperan dalam penyusunan laporan keuangan adalah kompetensi Sumber Daya Manusia. Berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah, maka kompetensi sumber daya manusia yang menjadi bagian dari proses penyusunan pelaporan keuangan daerah harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Penempatan aparatur pemerintah daerah harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan dalam memahami berbagai ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi SDM berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi.

Kualitas memiliki banyak makna bagi setiap orang sehingga pengertian kualitas dapat berbeda, hal tersebut disebabkan karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya. Berikut ini pengertian kualitas laporan keuangan intansi diantaranya, sebagai berikut : Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 32 ayat 2 pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut : “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstuktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Menurut Harahap (2013:146), bahwa : “Kualitas laporan keuangan merupakan criteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Menurut Bastian (2010:9) bahwa kualitas laporan keuangan adalah : “Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.”

### **Peranan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang

telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam kegiatan secara sistematis dan terstruktur dalam suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Merupakan suatu kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, lewat media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala (Mardiasmo, 2005). Dalam PP No. 71 Tahun 2010, akuntabilitas diperlukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Merupakan ilmu seni yang mengatur proses pemanfaatan SDM dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen akan berguna untuk mengevaluasi pelaksanaan entitas pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan serta pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan entitas pemerintah untuk kepentingan rakyat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity).

Bertujuan untuk membantu para pengguna mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja.

Merupakan proses penilaian yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang tepat guna berdasarkan visi, misi, sasaran serta tujuan yang jelas (Mangkunegara, 2009). Evaluasi kinerja bertujuan untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan.

**Indikator Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun empat indikator yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi

peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Menurut Aditya & Surjono (2018) membuat laporan keuangan untuk pemerintah, harus melalui proses dan fase diatur oleh sistem akuntansi pemerintah. Secara transparan serta dapat dipertanggung jawaban yang dilakukan oleh manajemen keuangan. Hal ini dapat dilakukan jika pemerintah daerah dapat membangun, mengoperasikan dan memelihara sistem pengendalian internal yang sesuai.

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pimpinan daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
3. Unsur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari unsur-unsur berikut:
  - a. Lingkungan Pengendali;  
Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.
  - b. Penilaian Resiko;  
Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah dapat menentukan

- tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan pengendalian;  
Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsinya.
  - d. Informasi dan Komunikasi;  
Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
  - e. Pemantauan pengendalian Intern.  
Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern yang meliputi: pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan penyelesaian audit.
4. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
  - b. Pembinaan sumber daya manusia;
  - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.

#### **Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Barney dalam Mangkunegara (2017: 111) berpendapat bahwa salah satu sumber daya yang dibutuhkan organisasi adalah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidang kerja organisasi tersebut. Menurut Fahmi (2016: 52), kompetensi pegawai adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai, yang memiliki nilai jual dan terlihat dari hasil kerja serta inovasi yang dihasilkan. Demikian juga dengan pendapat Edison (2017: 140), bahwa kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian, dan sikap.

Warisno (2008:6) mengungkapkan bahwa: “Instansi pemerintah harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.”

#### ***Hipotesis***

1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi SDM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Ferdinand (2014: 4) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengembangkan hipotesis berdasarkan kerangka pemikiran dan selanjutnya diuji secara kuantitatif hingga akhirnya sampai pada temuan akhir berupa hipotesis yang teruji.

### Populasi dan Sampel

Secara rinci, data populasi dalam penelitian ini adalah pejabat penata usaha keuangan *Organisasi Perangkat Daerah* yang berjumlah 36 orang dan 1 orang Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang. Dalam penelitian ini, metode sampel yang digunakan adalah metode sensus. Metode sampling sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian, total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 37 orang.

### Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, yakni data primer dan data sekunder maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk memberikan jawabannya kemudian diberi skor untuk dianalisis secara kuantitatif. Kuesioner ini dibagikan kepada 37 responden. Jawaban setiap item pernyataan menggunakan Skala Likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban diberi skor nilai skala sebagai berikut:

- a. Sangat Setuju (SS) : diberi skor 5
- b. Setuju (S) : diberi skor 4
- c. Cukup Setuju (CS) : diberi skor 3
- d. Kurang Setuju (KS) : diberi skor 2
- e. Tidak Setuju (TS) : diberi skor 1

#### 2. Wawancara

Data yang diambil melalui wawancara adalah berupa data pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, upaya pengendalian internal yang dilakukan, kompetensi SDM yang dimiliki, teknologi informasi yang digunakan.

### Teknik Analisis Data

#### Analisis Statistik Deskriptif

Untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menghitung persepsi responden (Levis, 2013: 108) dengan formula sebagai berikut:

$$P_{S-p} = \left( \frac{\bar{X} P_{S-p}}{5} \right) \times 100\%$$

Keterangan  $P_{S-p}$  = Kategori persepsi

:

$\bar{X} P_{S-p}$  = Rata-rata skor untuk persepsi populasi

5 = Skor tertinggi skala Likert

## Pengujian Data

### Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen dapat mengukur sesuatu dengan tepat terhadap apa yang hendak diukur. Uji validitas instrumen dilakukan untuk menguji validitas (ketepatan) tiap butir/item instrumen. Somantri dan Muhidin (2006) menyatakan bahwa formula yang digunakan untuk uji validitas instrumen adalah Koefisien Korelasi Product Moment dari Carl Pearson.

$$r_{xy} = \frac{n(\sum X_i \cdot Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

N : Jumlah responden

X<sub>i</sub> : Nomor item ke-i

$\sum X_i$  : Jumlah skor item ke i

X<sub>i</sub><sup>2</sup> : Kuadrat skor item ke i

$\sum X_i^2$  : Jumlah kuadrat item ke i

$\sum Y_i$  : Total dari jumlah skor yang diperoleh tiap responden

Y<sub>i</sub><sup>2</sup> : Kuadrat dari jumlah skor yang diperoleh tiap responden

$\sum Y_i^2$  : Total dari kuadrat jumlah skor tiap responden

$\sum X_i Y_i$  : Jumlah skor item ke i dan total skor yang diperoleh tiap responden

Berdasarkan rumus koefisien korelasi product moment, selanjutnya dihitung valid atau tidaknya setiap butir instrumen dengan menggunakan software SPSS. Jika Korelasi sudah lebih besar dari 0,30, maka pernyataan yang dibuat dikategorikan valid/shahih (Setiaji 2004).

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Formula yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen adalah koefisien Alfa ( $\alpha$ ), yaitu:

$$r_i = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right]$$
$$\sigma^2 = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$$

Keterangan :

r<sub>i</sub> :Reliabilitas instrument

K :Banyaknya bulir soal

$\sum \sigma_i^2$  :Jumlah varians bulir

$\sigma_t^2$  :Variants total

N :Jumlah Responden

Cara mengukur uji reliabilitas instrument dalam penelitian ini adalah melalui uji statistik Cronbach's Alpha pada aplikasi SPSS. Suatu konstruk atau variabel dikatakan

reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha > 0,60 (Ghozali 2009: 42).

### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam analisa regresi memenuhi syarat atau tidak.

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang dimiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS. Menurut Santoso (2012: 293) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal.

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data-data yang digunakan dalam analisis regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot* antara nilai variabel terikat (ZSPRED) dengan residualnya (SRESID), dimana sumbu X adalah yang diprediksi dan sumbu Y adalah residual (Sunyoto, 2013: 91). Menurut Ghozali (2009), dasar pengambilan keputusan yang dapat diambil adalah jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan adanya hubungan yang erat, kuat antara variabel bebas dan variabel terikat atau tidak. Untuk mengetahui ada atau tidak multikolinearitas dapat dipakai nilai VIF (*variance inflation factor*) dan *tolerance*. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF >10. Agar model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas, seluruh variabel bebas harus mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF masing-masing variabel tidak ada yang lebih besar dari 10. Jika nilai VIF kurang dari 10, maka terdapat gejala multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0.10, maka tidak ada gejala multikolinearitas

### **ANALISIS REGRESI BERGANDA**

Regresi Linear Berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono (2017: 276) persamaan regresi untuk n prediktor adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Y                                 | : Kualitas Laporan Keuangan                      |
| b <sub>1</sub> , b <sub>2</sub> , | : Koefisien Regresi                              |
| X <sub>1</sub>                    | : Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah |
| X <sub>2</sub>                    | : Variabel Kompetensi SDM                        |
| e                                 | : error (5%)                                     |

### **Pengujian Hipotesis**

Untuk menguji hipotesis ini maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

#### **Uji Parsial (Uji t)**

Untuk menguji signifikansi pengaruh tiap variabel bebas (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi SDM) terhadap variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang). Formulasi uji-t yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$T_{hitung} = bi / Sbi$$

Keterangan :

bi : Koefisien regresi

Sbi : Simpangan baku/ Standar error.

Taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$

#### **Kaidah pengambilan keputusan:**

Kaidah pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika  $\rho > \alpha$  (0,05), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi SDM tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang.
- Jika  $\rho \leq \alpha$  (0,05) maka diterima  $H_a$  dan  $H_0$  ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi SDM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang.

#### **Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji "F")**

Tujuan dari Uji F adalah untuk menguji secara simultan pengaruh variabel bebas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi SDM terhadap variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang, atau dengan kata lain untuk mengetahui pengaruh variabel bebas kepada variabel terikat secara bersama-sama. Supranto (2000) menyatakan formulasi uji F yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{JKR/(k-1)}{JKE/(n-k)}$$

Keterangan:

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKE : Jumlah Kuadrat Error

n : Banyaknya responden

k : Banyaknya variabel

Taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$

#### **Kaidah pengambilan keputusan:**

- Jika  $\rho > \alpha$  (0,05), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya secara simultan variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi SDM tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang.

- b. Jika  $\rho \leq \alpha$  (0,05) maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak artinya secara simultan variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi SDM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk mengetahui sumbangan/kontribusi secara bersama-sama semua variabel bebas yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi SDM terhadap variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang, dapat dilihat pada Koefisien Determinasi ( $R^2$ ). Sugiyono (2010: 280) menyatakan bahwa formulasi untuk menentukan nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) adalah sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{JKR}{JKT} \times 100\%$$

Keterangan :

- $R^2$  : Koefisien Determinasi  
JKR : Jumlah Kuadrat Regresi  
JKT : Jumlah Kuadrat Total

Jika nilai  $R^2$  mendekati nol berarti kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat rendah. Sebaliknya jika  $R^2$  mendekati 1 berarti semua variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil dari uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang digunakan dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap jawaban dari responden uji coba sebanyak 30 orang.

### Uji Validitas

Variabel kualitas laporan keuangan terdiri dari 8 item pernyataan, variabel teknologi informasi terdiri dari 10 item pernyataan, variabel sistem pengendalian internal terdiri dari 10 item pernyataan, dan variabel kompetensi SDM terdiri dari 6 item pernyataan. Hasil uji validitas dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas**

No	Koefisien Korelasi			Ket
	Kualitas Laporan Keuangan	Sistem Pengendalian Internal	Kompetensi SDM	
1	0,802	0,855	0,600	Valid
2	0,705	0,804	0,679	Valid
3	0,730	0,696	0,818	Valid
4	0,802	0,808	0,914	Valid
5	0,814	0,488	0,619	Valid
6	0,773	0,427	0,600	Valid

7	0,822	0,854		Valid
8	0,730	0,660		Valid
9		0,784		Valid
10		0,849		Valid

Sumber : Hasil Olah Data (2021)

Pada Tabel 1 di atas terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan mempunyai nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 sehingga dinyatakan valid. Dengan demikian, pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

### Uji Reliabilitas

Hasil uji Reliabilitas dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Ket
Kualitas Laporan Keuangan	0.900	8	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0.907	10	Reliabel
Kompetensi SDM	0.852	6	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data (2021)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 sebagaimana yang disyaratkan, sehingga semua item pernyataan dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

#### Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Kupang. Capaian indikator pada variabel kualitas laporan keuangan dapat dirangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan**

No	Indikator	Item Pernyataan	□	$\bar{X}Ps - p$	$(\bar{X}Ps - p)/5$	$Ps - p$	Skor Indikator	Kategori
1	Relevan	1	133	3,59	0,72	71,89	74,05	Baik
		2	141	3,81	0,76	76,22		
2	Andal	3	134	3,62	0,72	72,43	72,97	Baik
		4	136	3,68	0,74	73,51		
3	Dapat dibandingkan	5	140	3,78	0,76	75,68	76,49	Baik
		6	143	3,86	0,77	77,30		
4	Dapat dipahami	7	140	3,78	0,76	75,68	76,22	Baik
		8	142	3,84	0,77	76,76		
<b>Rata-rata</b>							<b>74,93</b>	<b>Baik</b>

Sumber : Hasil Olah Data (2021)

Dari hasil pada Tabel 3, diketahui bahwa capaian indikator dari variabel kualitas laporan keuangan memperoleh rata-rata capaian 74,93%. Nilai terendah adalah indikator andal yaitu 72,97%. Dengan skor capaian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan berada dalam standar keputusan baik.

### 1. Variabel Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal adalah metode yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang untuk menjaga dan melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat, memperbaiki efisiensi dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen terkait laporan keuangan. Capaian tiap indikator dari variabel Sistem Pengendalian Internal adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Internal**

No	Indikator	Item Pernyataan	□	$\bar{X}Ps - p$	$(\bar{X}Ps - p)/5$	Ps - p	Skor Indikator	Kategori
1	Lingkungan pengendalian	1	142	3,84	0,77	76,76	77,30	Baik
		2	144	3,89	0,78	77,84		
2	Penilaian resiko	3	142	3,84	0,77	76,76	76,22	Baik
		4	140	3,78	0,76	75,68		
3	Kegiatan pengendalian	5	130	3,51	0,70	70,27	70,81	Baik
		6	132	3,57	0,71	71,35		
4	Informasi dan Komunikasi	7	141	3,81	0,76	76,22	76,76	Baik
		8	143	3,86	0,77	77,30		
5	Pemantauan	7	137	3,70	0,74	74,05	74,59	Baik
		8	139	3,76	0,75	75,14		
<b>Rata-rata</b>							<b>75,14</b>	<b>Baik</b>

Sumber : Hasil Olah Data (2021)

Dari hasil pada Tabel 4, diketahui bahwa capaian indikator dari variabel sistem pengendalian internal memperoleh rata-rata capaian 75,14%. Nilai terendah adalah indikator kegiatan pengendalian yaitu 70,81%. Dengan skor capaian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berada dalam standar keputusan baik.

### Variabel Kompetensi SDM

Kompetensi SDM adalah kemampuan kerja setiap PPK-OPD Pemerintah Kabupaten Kupang yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standard yang ditetapkan. Capaian indikator variabel Kompetensi SDM adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Deskripsi Variabel Kompetensi SDM**

No	Indikator	Item Pernyataan	□	$\bar{X}Ps - p$	$(\bar{X}Ps - p)/5$	Ps - p	Skor Indikator	Kategori
1	Pengetahuan	1	145	3,92	0,78	78,38	77,84	Baik
		2	143	3,86	0,77	77,30		
2	Ketrampilan	3	138	3,73	0,75	74,59	74,05	Baik
		4	136	3,68	0,74	73,51		
3	Sikap	5	143	3,86	0,77	77,30	76,76	Baik
		6	141	3,81	0,76	76,22		
<b>Rata-rata</b>							<b>76,22</b>	<b>Baik</b>

Sumber : Hasil Olah Data (2021)

Dari hasil pada Tabel 5, diketahui bahwa capaian indikator dari variabel Kompetensi SDM memperoleh rata-rata capaian 76,22%. Nilai terendah adalah indikator ketrampilan yaitu 74,05%. Dengan skor capaian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi SDM berada dalam standar keputusan baik.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Hasil analisis uji normalitas untuk melihat normal tidaknya data dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6**  
**Hasil Pengujian Normalitas**

No	Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	Sistem Pengendalian Internal	0.183	Data Berdistribusi Normal
2	Kompetensi SDM	0.200	Data Berdistribusi Normal

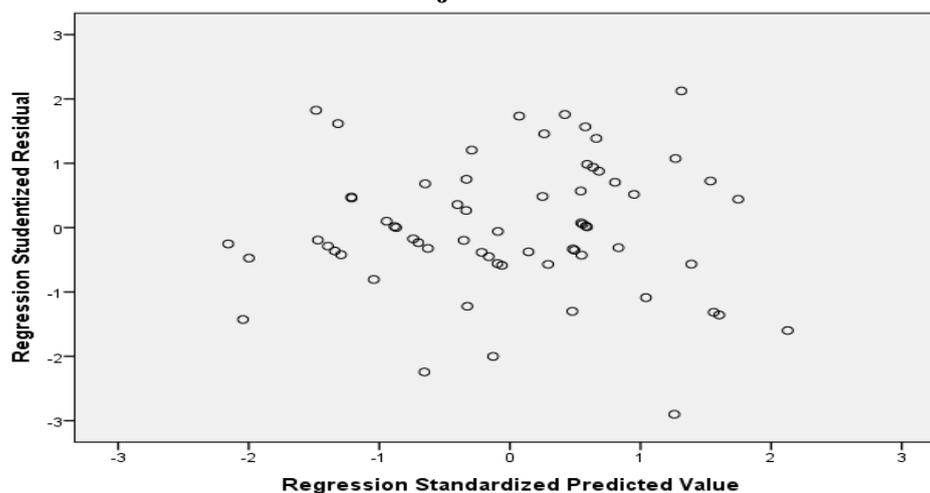
Sumber : Hasil Olah Data (2021)

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 6 diketahui bahwa nilai signifikan untuk semua variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data yang diuji berdistribusi normal.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data-data yang digunakan dalam analisis regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil analisis uji heteroskedastisitas dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini:

**Gambar 1**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Hasil Olahan Data (2021)

Pada Scatterplot Gambar 1 di atas, ditunjukkan bahwa data menyebar merata baik di atas maupun dibawah titik nol. Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa data hasil penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain sebaran data adalah sama

(homokedastisitas).

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan adanya hubungan yang erat, kuat antara variabel bebas dan variabel terikat atau tidak. Hasil analisis uji multikolinearitas dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 7**  
**Hasil Pengujian Multikolinearitas**

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Sistem Pengendalian Internal	0,796	1,257	Tidak Terjadi Multikolinearitas
2	Kompetensi SDM	0,882	1,134	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : Hasil Olahan Data, (2021)

Dengan melihat hasil pengujian multikolinearitas Tabel 7 diketahui bahwa variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF masing-masing variabel tidak ada yang lebih besar dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang sempurna antara variabel bebas (*independent*), sehingga dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan uji yang dilakukan tidak ditemukan pelanggaran terhadap asumsi klasik, yaitu normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinieritas, sehingga model regresi linier yang digunakan dalam model penelitian ini dapat digunakan untuk membuat peramalan atau pendugaan terhadap koefisien-koefisien regresi yang dihasilkan dari model.

### Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 8**  
**Analisis Regresi berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	3.223	3.708	
Sistem Pengendalian Internal	.316	.140	.159
Kompetensi SDM	.557	.140	.413

Sumber : Hasil Olah Data (2021)

Hasil olahan data pada Tabel 8 di atas, dapat dibuatkan model persamaan Regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3.223 + 0,159 X_1 + 0,413 X_2 + e...$$

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Hipotesis secara parsial (Uji t)

Hasil analisis uji hipotesis uji t dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 9**  
**Uji Hipotesis Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.223	3.708		.869	.388
Sistem Pengendalian Internal	.316	.140	.159	2.263	.027
Kompetensi SDM	.557	.140	.413	3.968	.000

Sumber : Hasil Olah Data (2021)

Penjelasan dari hasil pada Tabel 9 adalah sebagai berikut:

a. Variabel Sistem Pengendalian Internal ( $X_1$ ) :

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2,263 dengan nilai signifikansi sebesar 0,027. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05), maka keputusannya adalah menerima hipotesis alternatif ( $H_a$ ), bahwa secara parsial variabel Sistem Pengendalian Internal ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan Kabupaten Kupang. Artinya dengan meningkatkan Sistem Pengendalian Internal, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan hasil ini, maka hipotesis ketiga diterima.

b. Variabel Kompetensi SDM ( $X_2$ ) :

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t sebesar 3,968 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05), maka keputusannya adalah menerima hipotesis alternatif ( $H_a$ ), bahwa secara parsial variabel Kompetensi SDM ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan Kabupaten Kupang. Artinya dengan meningkatkan Kompetensi SDM, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan hasil ini, maka hipotesis keempat diterima.

**Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F)**

Hasil analisis uji hipotesis uji F dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 10**  
**Uji Hipotesis Simultan (Uji F)**  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Mean Square	F	Sig.
1	Regression	316.205	51.186	.000 <sup>b</sup>
	Residual	6.178		
	Total			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi SDM

Sumber : Hasil Olah Data (2021)

Hasil uji statistik berdasarkan perhitungan Anova menunjukkan nilai F sebesar 51,186 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan, yaitu 5% atau 0,05, maka ke 2 variabel bebas secara simultan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Kupang. Artinya naik-turunnya nilai kualitas laporan keuangan Kabupaten Kupang sangat ditentukan oleh naik turunnya ke 2 variabel bebas dalam

penelitian ini, yaitu: sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil  $R^2$  yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 11**  
**Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<i>Model Summary</i>				
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
1	.846 <sup>a</sup>	.716	.702	2.48547

Sumber : Hasil Olah Data (2021)

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 11 di atas, terlihat bahwa nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,716. Hal ini diartikan bahwa kontribusi variabel sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM terhadap variasi naik turunnya kualitas laporan keuangan Kabupaten Kupang sebesar 71,6 %, sedangkan sisanya sebesar 28,4 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

## Pembahasan

### Analisis Deskriptif

#### 1. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Kupang. Indikator menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Capaian indikator pada variabel kualitas laporan keuangan memperoleh rata-rata capaian 74,93%. Nilai terendah adalah indikator andal yaitu 72,97%. Dengan skor capaian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan berada dalam standar keputusan baik.

#### 2. Sistem Pengendalian Internal

Capaian indikator dari variabel sistem pengendalian internal memperoleh rata-rata capaian 75,14%. Nilai terendah adalah indikator kegiatan pengendalian yaitu 70,81%. Dengan skor capaian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berada dalam standar keputusan baik.

#### 3. Kompetensi SDM

Capaian indikator dari variabel Kompetensi SDM memperoleh rata-rata capaian 76,22%. Nilai terendah adalah indikator ketrampilan yaitu 74,05%. Dengan skor capaian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi SDM berada dalam standar keputusan baik. Dengan hasil ini, maka menolak hipotesis pertama yang dirumuskan yaitu "Kompetensi SDM pada Pemerintah Kabupaten Kupang cukup baik".

### Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2,263 dengan nilai signifikansi sebesar 0,027. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05), maka keputusannya adalah menerima hipotesis alternatif ( $H_a$ ), bahwa

secara parsial variabel Sistem Pengendalian Internal ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan Kabupaten Kupang. Artinya dengan meningkatkan Sistem Pengendalian Internal, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan hasil ini, maka hipotesis ketiga diterima. Hasil ini dapat terjadi karena sistem pengendalian internal telah ditingkatkan, dengan cara setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kupang memberlakukan sistem evaluasi pengelolaan anggaran setiap bulan. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan akan melakukan pencatatan dan laporan kepada pimpinan mengenai realisasi anggaran, sisa anggaran, serta data aset. Dengan demikian, pimpinan dapat melakukan pemeriksaan pada tiap laporan keuangan dan aset yang tersedia, disesuaikan antara data fisik dan data pada laporan

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk mewujudkan tata kelola penyenggaraan pemerintah yang baik, serta yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk keuangan daerah. Dengan adanya SPIP tersebut, diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat pengawasan terhadap aktivitas keuangan daerah, dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan daerah. Jika SPIP berjalan secara optimal, maka dapat meminimalisir penyimpangan atau kesalahan tata kelola keuangan daerah, yang nantinya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Eveline (2016) Pengolahan sesuai dengan kebutuhan dan situasi pengendalian internal yang baik menghidupkan semangat organisasi untuk melanjutkan upaya mempertahankan kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal yang terintegrasi dari unit ke delegasi dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan harapan organisasi. Hal ini juga terbukti dari penelitian (Trisnawati, 2018) bahwa sistem pengendalian internal memiliki efek positif pada kualitas pelaporan keuangan. sedangkan Menurut Aditya & Surjono (2017) membuat laporan keuangan untuk pemerintah, harus melalui proses dan fase diatur oleh sistem akuntansi pemerintah. Secara transparan serta dapat dipertanggung jawaban yang dilakukan oleh manajemen keuangan. Hal ini dapat dilakukan jika pemerintah daerah dapat membangun, mengoperasikan dan memelihara sistem pengendalian internal yang sesuai.

Sebuah proses integral dalam kepemimpinan dan perilaku yang berkelanjutan dan kegiatan dari seluruh karyawan hak untuk memberikan kredibilitas mencapai tujuan organisasi melalui efektif dan efisien antara sistem pengendalian internal dan kualitas pelaporan keuangan berdampak signifikan penelitian ini.

### **Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang**

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai  $t$  sebesar 3,968 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05), maka keputusannya adalah menerima hipotesis alternatif ( $H_a$ ), bahwa secara parsial variabel Kompetensi SDM ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan Kabupaten Kupang. Artinya dengan meningkatkan Kompetensi SDM, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan hasil ini, maka hipotesis keempat diterima. hasil ini dapat terjadi karena dalam hal kompetensi SDM,

Pemerintah Kabupaten Kupang telah menyiapkan program kegiatan bimbingan teknis bagi pimpinan OPD, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Bendahara Keuangan serta Bendahara Barang (Aset). Bimtek ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret dan Oktober. Dalam bimtek ini, setiap pengelola anggaran diwajibkan untuk ikut tanpa diwakili. Dengan demikian, hasil kegiatan menjadi lebih tepat sasaran yaitu kepada para pengelola keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang pengelola keuangan. SDM harus memiliki kompetensi di bidang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan, yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan agar laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Sehingga diharapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka dibutuhkan bukan hanya jumlah sumber daya manusia melainkan kompetensi yang dimiliki SDM tersebut.

Menurut Trisnawati (2018) Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah semakin baik apabila pengolahan SDM juga baik. Menurut Taman (2017) Kualitas sumber daya manusia ialah kemampuan karyawan untuk berurusan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan tugas. Dalam menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif juga mendukung ketepatan waktu pelaporan keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Dan berdasarkan hasil penelitian Eveline (2016) sumber daya manusia dengan keterampilan akuntansi yang baik dalam menguasai proses penyusunan laporan keuangan sampai publikasi. Artinya, SDM dapat mengontrol proses dan menjaga proses sesuai dengan aturan. Hal ini memungkinkan SDM untuk melakukan kontrol internal dalam persiapan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan Kabupaten Kupang dengan nilai  $t$  2,263 dan nilai signifikansi 0,027. Artinya dengan meningkatkan Sistem Pengendalian Internal, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan Kabupaten Kupang dengan nilai  $t$  3,968 dan nilai signifikansi 0,000. Artinya dengan meningkatkan Kompetensi SDM, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
3. Hasil analisis statistik inferensial (uji F) memperoleh nilai F sebesar 51,186 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari kedua variabel bebas, yaitu sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Kupang. Dengan demikian, apabila variabel bebas saling mendukung dan tidak ada satu pun variabel yang diabaikan maka kualitas laporan keuangan Kabupaten Kupang akan meningkat.

4. Kontribusi variabel sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Kupang, sebesar 71,6 %, sedangkan sisanya sebesar 28,4 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

## REFERENSI

- Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(1), 49.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM.
- Aldiano, Helmi Prila & Septiano, Remil. 2021. Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Menara Ekonomi, Fakultas Ekonomi UMSB.*. Vol. VII, No.2
- Alvin A. Arens. 2014. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta: Gelora Aksara. Pratama.
- Basalamah, M. Anies. 2007. *Auditing PDE Dengan Standar IAI*. Depok: Usaha Kami.
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Byars, Lloyed L dan Rue, Leslie W. 2006. *Human Resource Management, 8 edition*. New York: McGraw-Hill Irwin.
- Darmawan, Eko. 2014. *Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan*. Riau: Yayasan Pusaka Riau.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jakarta: RMBOOKS.
- Edison, Emron. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Ernawati Fidyah Yuli, M. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Moderasi Pemanfaatan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (J'MAT)*, 8(17), 132–153.
- Eveline, F. (2017). Pengaruh Sap Berbasis Akruar, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sdm, Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.25105/mraai.v16i1.2004>
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Juwita, R. (2018). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 12(2), 201. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v12i2.480>
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Masiaga, N. (2019). The Implication Of Accounting Information System , Financial Performance Measurement And Decision Making Authority To The Performance

- Accountability (Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Ukuran Kinerja Keuangan dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap A. *Accounting Journal*, 02, 11–21.
- Nadir, R., & Hasyim, H. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Empiris Di Pemda Kabupaten Barru). *Akuntabel*, 14(1), 57. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1007>
- Ruky. 2003. *Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia. Pustaka.
- Rusman. 2011. *Sistem Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyowati, Leny. 2010. *Panduan Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Jakarta :Elex Media Komputindo.
- Sutrisno, Edy. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Fakhrurazi. 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi* Vol. 3 No. 2
- Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Jurnal Studi dan Penelitian Akuntansi* Vol. 11 No. 1 Hal. 1-14.
- Inapty, Adha. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov NTB). *Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol. 9 No. 1 Hal. 27-42.
- Nurillah. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Jurnal manajemen Keuangan* Vol. 3 No. 1 Hal. 78-91.
- Oktarina, Mia. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pandanaran* Vol. 2 No. 2 Hal. 233-248
- Yendrawati, Reby. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* Vol. 17 No. 2 Hal. 166-175.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Daerah